

TESIS

**PELIBATAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TINDAK PIDANA
TERORISME PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**



**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh:

Messy Rachel Mariana Hutapea, S.H.

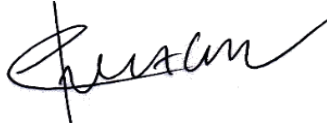
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, Tanggal 03 Agustus 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.NIP. 198001232009121005

Dosen Pembimbing Kedua:



Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.MNIP. 198104072005011001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 01 Agustus 2022

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum
NIP. 196809281997021001

Anggota : Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198001232009121005

Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M
NIP. 197905272005012001

Zendy Wulan Ayu Widhi, S.H., LL.M
NIP. 198303242006042002

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198104072005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Messy Rachel Mariana Hutapea, S.H.

NIM : 032024153002

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Messy Rachel Mariana Hutapea, S.H.

NIM. 032024153002

MOTTO

“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur “

-FILIPPI 4:6-

ABSTRAK

Peristiwa tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia membuat masyarakat merasa takut terhadap ancaman terorisme, sehingga pemerintah merevisi undang-undang tentang terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada Pasal 43I dan juga pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dalam pasal ini pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang atau yang disingkat sebagai OMSP.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kewenangan TNI pada pemberantasan tindak pidana terorisme dan akibat hukum pelibatan TNI dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi tindak pidana terorisme menimbulkan akibat hukum yaitu bahwa TNI masuk dalam ranah sistem peradilan pidana yang dimana akan bertentangan dengan sistem TNI yaitu yang tunduk pada sistem militer dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia belum secara jelas mengatur tentang batasan-batasan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dan belum juga terdapat mengatur tentang mekanisme pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sehingga akan berdampak pada tumpang tindih tugas dan fungsi antara TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme.

Kata kunci; Terorisme, TNI, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Sistem Hukum Pidana.

ABSTRACT

The incidents of criminal acts of terrorism in Indonesia made people feel afraid of the threat of terrorism, so the government revised the law on terrorism into Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The law regulates the involvement of the TNI in overcoming acts of terrorism in Article 43I and also the involvement of the TNI in dealing with acts of terrorism as regulated in Article 7 paragraph (2) letter b, in this article the involvement of the TNI in dealing with acts of terrorism is in the form of Military Operations Other Than War or which is abbreviated as OMSP.

The results of this study indicate that the involvement of the TNI in overcoming criminal acts of terrorism has legal consequences, namely that the TNI is included in the realm of the criminal justice system which will conflict with the TNI system, which is subject to the military system and in Law Number 5 of 2018 concerning Eradication Criminal Acts of Terrorism and Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces have not clearly stipulated the limits for the involvement of the TNI in overcoming acts of terrorism, and there has also been no regulation on the mechanism for involving the TNI in overcoming terrorism so that it will have an impact on overlapping tasks and function between the TNI and Polri in dealing with acts of terrorism.

The formulation of the problem from this research is the authority of the TNI in eradicating criminal acts of terrorism and the legal consequences of involving the TNI in overcoming criminal acts of terrorism. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach

Keywords: Terrorism, TNI, Presidential Government System, and Criminal Justice System.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul *Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Peradilan Pidana*

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain sebagai persyaratan program Pasca Sarjana, penulisan tesis ini berguna untuk memberikan masukan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk hukum pidana.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapat banyak dukungan moril yaitu masukan dan saran, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si., selaku Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, Dan Alumni Universitas Airlangga Surabaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., selaku Wakil Rektor bidang Sumberdaya;
4. Bapak Prof. Bambang Sektiari Lukiswanto, Drh., DEA., selaku Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi, dan Community Development;
5. Bapak Muhammad Miftahussurur, dr. M.Kes., Sp. PD, Ph.D., selaku Wakil Rektor bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi;
6. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

7. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
8. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan III bidang Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama;
9. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
10. Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing utama penulis;
11. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing kedua penulis;
12. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing MKPT 1 penulis;
13. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing MKPT 2 penulis;
14. Bapak dan Ibu dosen pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu dari semester 1 hingga semester akhir ini;
15. Bapak dan Ibu dosen penguji yaitu bapak Dr. Bambang Suheryadi, SH., M.Hum, bapak Dr. Mohamad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M, ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M, ibu Zendy Wulan Ayu Widhi, S.H., LL.M, bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M yang telah menguji tesis penulis;
16. Orang tua penulis yaitu bapak Sahat Maruli Hutapea, S.H. dan ibu Sri Lynda Deciana Panggabean, S.Pd yang telah memberikan dukungan moril dan materiil dalam pelaksanaan perkuliahan penulis sehingga dapat menyelesaikan masa studi penulis dengan tepat waktu;
17. Kakak penulis yaitu Sally Ruth Minar Agnestesia Hutapea, S.E yang telah memberikan semangat pada penulis dalam pengerjaan tesis ini;

18. Teman-teman seangkatan program studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi-informasi selama menjalani masa perkuliahan dari semester 1 hingga semester akhir;
19. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi tempat bercerita penulis selama penyusunan tesis ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan baik demi masukan tesis penulis. Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi sesama, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Penulis,

Messy Rachel Mariana Hutapea, S.H.

NIM. 032024153002

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Antara Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	44
Tabel 2 Hubungan Antar Lembaga dan Kewenangan.....	50

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii-x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii-xv

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1-4
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Keaslian Penelitian.....	5-10
1.6. Tinjauan Pustaka.....	10-15
1.7. Metode Penelitian	15-18
1.8. Sistematika Penulisan.....	18-19

BAB II: KEWENANGAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

2.1. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	20-26
2.1.1. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	20-26
2.1.2. Kedudukan dan Fungsi TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Presidensial.....	26-31
2.2. Perkembangan Tindak Pidana Terorisme	32-45
2.2.1. Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan	32-45
2.2.2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme	45-46
2.3. <i>RatioLegis</i> Kewenangan TNI Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Sistem Presidensial.....	47-51
2.3.1. Prinsip-prinsip Ketertlibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme	47-51
2.3.2. Model Keterlibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme.....	52-54

BAB III: AKIBAT HUKUM PERBANTUAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME PADA SITEM PERADILAN PIDANA

3.1. <i>Justifikasi</i> Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme.....	55-57
3.1.1. Operasi Militer Perang	55-57
3.1.2. Operasi Militer Selain Perang.....	57-59
3.1.3. Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme.....	59-60

3.2. Akibat Hukum Pelibatan Perbantuan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme

Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana 61-62

3.2.1. Aktivitas TNI Dalam Perbantuan Mengatasi Aksi Terorisme..... 61-62

3.2.2. Akibat Hukum TNI Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Sistem Peradilan

Pidana 62-68

BAB IV: PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 69

4.2. Saran..... 70

DAFTAR BACAAN..... 71-75